

DETERMINAN *FRAUD* DANA DESA: ANALISIS *FRAUD* PENTAGON
(Studi Empiris pada Aparatur Pemerintah Desa di Lingkup Pemerintahan Desa di Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta)

Fahjar
Fahjar23@gmail.com

Prodi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Jalan Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta (0274)387646

ABSTRACT

This research aims to analyze the influence of the position of the village apparatus, financial pressure, competence of the village apparatus, ineffective monitoring, system weakness, rationalization towards fraud in village funds and religiosity as a moderating variable of rationalization towards fraud in village funds. This research was reviewed from the perspective of village apparatus. This study using judgement sampling method conducted in the Special Province of Yogyakarta. The type of data used is primary data. By adopting the pentagon fraud theory, this study revealed seven hypotheses tested using SEM-PLS analysis tools through the SmartPLS v3.0 application. The results showed that the position of the village apparatus, financial pressure, rationalization, and system weakness had a positive effect on fraud behavior in village funds, while the competence of village officials and ineffective monitoring did not significantly influence fraud in village funds. Meanwhile, religiosity has been proven to weaken the positive influence of rationalization on fraud in village funds.

Keywords: *Position of the Village Apparatus Financial Pressure, Village Apparatus Competencies, Ineffective Monitoring, System Weakness, and Rationalization.*

PENDAHULUAN

Dana desa adalah sejumlah dana yang digelontorkan oleh pemerintah ke pemerintah desa yang masuk ke dalam anggaran pendapatan desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan serta pemberdayaan untuk masyarakat, hal ini tertuang dalam Pemendagri No. 113 tahun 2014.

Berdasarkan artikel yang ditulis oleh Kemenkeu RI (2018) menjelaskan bahwa kebijakan dana desa terus meningkat, yaitu sejumlah Rp20,67 triliun untuk tahun 2015, Rp46,98 triliun untuk tahun 2016, dan Rp60 triliun untuk tahun 2017 dan 2018. Sementara itu, data akhir tahun 2019 yang diunggah oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2019) menunjukkan bahwa sejumlah dana desa telah

digelontorkan secara desentralisasi kepada 74.954 desa yang ada di Indonesia dengan jumlah dana mencapai Rp70 trilliun.

Secara empiris peningkatan pengalokasian dana desa bertolakbelakang dengan harapan pemerintah dan rakyat Indonesia. Peningkatan sejumlah dana desa yang diberikan ke desa sebagai stimulus peningkatan pembangunan desa justru sangat rentan terhadap penyalahgunaan sejumlah dana desa atau korupsi terhadap dana yang digelontorkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah desa.

Korupsi merupakan salah satu bentuk kecurangan atau *fraud* yang terjadi pada sektor publik. Kasus-kasus korupsi yang terjadi menyebabkan Alokasi Dana Desa yang semakin meningkat tersebut dipertanyakan relevansinya. Kusumo (2018) menyatakan bahwa terdapat tindakan korupsi yang dilakukan pada beberapa desa yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, salah satunya aparaturnya Desa Beji, Kecamatan Ngawen, Gunungkidul. Aparatur yang berinisial SW ditetapkan sebagai tersangka korupsi terhadap dana desa sebesar Rp400 juta. Selain itu, BPK (2018) juga menemukan bahwa tindakan korupsi pada dana desa tidak hanya terjadi di Gunungkidul, tetapi juga di Sleman. Hal ini diperkuat dengan data yang ditunjukkan berdasarkan pengamatan dan peninjauan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) bahwa penyelewengan terhadap dana desa oleh aparaturnya desa semakin bertambah sejak 2015 hingga 2018 terakhir. Terdiri dari 181 kasus korupsi pada dana desa yang menimbulkan kerugian bagi negara hingga Rp40,6 miliar, hal ini dinyatakan oleh Ishanuddin (2018). *Indonesian Corruption Watch* (ICW) dalam CNN (2019) mencatat kasus korupsi terbesar yang terjadi selama tahun 2018 berada pada sektor Anggaran Desa. Dengan demikian, dana desa sebagai stimulus peningkatan pembangunan desa justru sangat rentan terhadap penyalahgunaan dan tindakan korupsi pada sejumlah dana desa yang digelontorkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah desa.

Faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya tindakan fraud diungkapkan oleh Crowe pada tahun 2011. Crowe (2011) menyebutnya sebagai teori *fraud pentagon*. Lima faktor pemicu dalam teori *fraud pentagon* yang memotivasi individu melakukan *fraud*, diantaranya kesombongan (*arrogance*), tekanan (*pressure*), kemampuan (*competence*), peluang (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*).

Arrogance dan *competence* disebut sebagai pemeran inti dalam perilaku kecurangan karena pelaku dapat melakukan tindakan kecurangan secara berulang dengan sifat *arrogance* dan *competence* yang dimilikinya. Kemudian *Opportunity* akan membuka pintu masuk untuk melakukan kecurangan. Sementara itu, *pressure* dan rasionalisasi mampu mendorong pelaku dalam melakukan tindakan kecurangan, hal ini dinyatakan oleh Hariyanto, dkk (2014).

Fraud pada dana desa sangat berkaitan dengan tindakan dan perilaku aparatur desa. Salah satu yang mempengaruhi seseorang dalam berperilaku adalah sifat religius sehingga *fraud* sangat berkaitan dengan tingkat religiusitas yang melekat dalam diri aparatur desa ataupun pelaku kecurangan. Religiusitas sangat berkaitan dengan moral dan perilaku. Moral dan perilaku baik yang melekat pada diri individu akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kinerja yang dilakukan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Zulaikha dan Hadiprajitno (2017) dan Aini, dkk (2017) adalah *grand theory* yang digunakan dengan konteks penelitian yang dilakukan pada sektor publik atau pemerintah dan menambahkan beberapa keterbaruan variabel seperti Jabatan Aparatur Desa, *Ineffective Monitoring*, dan Religiusitas. Pemilihan aparatur desa sebagai responden pada penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan perilaku kecurangan pada dana desa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat dan aparatur desa dalam menambah wawasan dan dimensi pemahaman yang lebih luas terkait *fraud* yang terjadi pada dana desa serta menjadi kewaspadaan bagi pemerintah sehingga mampu mengambil sebuah kebijakan atau langkah dalam meminimalisir terjadinya tindakan korupsi pada dana desa

TINJAUAN LITERATUR DAN PENURUNAN HIPOTESIS

Fraud Pentagon Theory

Setiawati dan Baningrum (2018) menyatakan bahwa teori *fraud pentagon* merupakan pengembangan dari teori *fraud triangle* yang ditulis Cressey (1953) dan teori *fraud diamond* oleh Wolfe dan Hermanson (2004). *Fraud triangle* hanya memiliki tiga elemen diantaranya *pressure*, *opportunity*, dan *rationalization*. Kemudian Wolfe dan Hermanson menambahkan satu elemen dalam *fraud diamond*,

yaitu *capability* sebagai penyempurnaannya. Pada tahun 2011, Crowe Howarth menambahkan satu elemen lagi, yaitu *arrogance* sebagai penyebab terjadinya tindakan *fraud* atau kecurangan sehingga terdapat lima elemen yang mempengaruhi terjadinya *fraud*, yaitu *arrogance*, *pressure*, *competence*, *opportunity*, dan *rationalization*.

Berikut penjelasan mengenai elemen-elemen yang terkandung dalam *fraud pentagon*: (1) *Arrogance*: adalah sifat superioritas yang mendorong seseorang menggunakan hak yang dimiliki secara tidak benar dan menganggap bahwa sistem pengendalian internal, pengawasan, dan peraturan tidak berlaku untuk dirinya, hal ini dinyatakan oleh Novianti dan Annisa (2018). (2) *Pressure*: adalah dorongan yang menyebabkan orang melakukan *fraud*. Pada umumnya *pressure* merupakan sesuatu yang terjadi karena kondisi keuangan dan kondisi eksternal. Penelitian Puspitha dan Yasa (2018) menjelaskan bahwa tekanan akan dirasakan apabila pertumbuhan keuangan perusahaan tidak lebih baik dibandingkan dengan perusahaan kompetitor sehingga *fraud* dapat terjadi karena seseorang memiliki tekanan. (3) *Competence*: adalah elemen yang menjadi kesempatan seseorang dalam melakukan tindakan kecurangan akibat kemampuannya dalam mengontrol pengendalian internal dan situasi untuk keuntungan pribadinya, hal ini dinyatakan oleh Akbar (2017). (4) *Opportunity*: adalah tersedianya lingkungan atau situasi yang tepat dalam melakukan kecurangan. Zaki (2017) menyatakan bahwa suatu peluang diperoleh ketika seseorang memiliki kebebasan dalam melakukan kecurangan dengan tanpa diketahui oleh siapapun dan tanpa diawasi oleh siapapun. (5) *Rationalization*: adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk membenarkan diri sendiri sehingga dapat menutupi kesalahan yang dilakukan dengan berbagai alasan, hal ini dinyatakan oleh Bawekes (2018).

Planned Behavior Theory

Planned Behavior Theory adalah teori mengenai perilaku seseorang. Teori ini menjelaskan bahwa manusia yang bersifat rasional akan mempertimbangkan informasi dan dampak dalam memutuskan untuk mewujudkan perilaku tertentu, hal ini dijelaskan oleh Windasari dan Juliarsa (2016).

Mengutip dari penelitian Ajzen (1991) bahwa terdapat tiga komponen yang menentukan keyakinan seseorang untuk berperilaku dalam Teori *Planned Behavior*, diantaranya sikap (*attitude*), norma subjektif (*subjective norm*), dan perilaku kontrol (*perceived behavioral control*). Tiga elemen ini akan menjadi pengukur salah satu dimensi dari teori *fraud pentagon*, yaitu rasionalisasi.

“The first is the attitude toward the behavior and refers to the degree to which a person has a favorable or unfavorable evaluation or appraisal of the behavior in question. The second predictor is a social factor termed subjective norm; it refers to the perceived social pressure to perform or not to perform the behavior. The third antecedent of intention is the degree of perceived behavioral control which, as we saw earlier, refers to the perceived ease or difficulty of performing the behavior and it is assumed to reflect past experience as well as anticipated impediments and obstacles.”

Fraud

Penelitian Aprilia (2017) mengungkapkan bahwa *fraud* adalah tindakan penipuan yang dilakukan oleh satu atau lebih pihak tertentu atau organisasi lain yang terlibat untuk mendapatkan uang, jasa, properti bahkan untuk menghindari pembayaran atau kerugian atas jasa atau guna mengamankan keuntungan pribadi atau keuntungan bisnis. Aksa (2018) menjelaskan bahwa *fraud* dapat berupa penyalahgunaan kepentingan atau disebut *conflict of interest*, korupsi, penyuapan, penerimaan yang tidak sah, dan lain sebagainya. *Association of Certified Fraud Examiners/ACFE* di USA dalam penelitian Irphani (2017) mengategorikan tiga bentuk kecurangan atau *fraud*, yaitu fraud pada laporan keuangan, penyalahgunaan aset, dan korupsi. Definisi fraud pada dana desa lebih cenderung pada korupsi karena mengambil uang publik untuk kepentingan pribadi.

PENURUNAN HIPOTESIS

Pengaruh Jabatan Aparatur Desa terhadap *Fraud* Dana Desa

Faktor awal yang memungkinkan terjadinya kecurangan, yaitu fungsi dan kedudukan atau jabatan dalam suatu organisasi, hal ini dinyatakan oleh Abdullahi dan Mansor (2015). Jabatan yang tinggi menunjukkan adanya sikap superioritas yang lebih tinggi. Selanjutnya, Saputra, dkk (2019) menyatakan bahwa jabatan merupakan proyeksi dari faktor *arrogance* pada teori *fraud pentagon*. Jabatan akan memberikan kekuasaan yang lebih luas bagi pelaku kecurangan yang melihat celah untuk

melakukan tindakan kecurangan dan merespon peluang tersebut sehingga jabatan yang tinggi dapat menyebabkan terjadinya *fraud*.

Irphani (2017) dan Budiartini, dkk (2019) menemukan bahwa jabatan dalam pengelola keuangan berpengaruh signifikan terhadap *fraud*. Di samping itu, Gbegi dan Adebisi (2013) juga menjelaskan bahwa pejabat pengelola yang tidak berintegritas berpengaruh terhadap *fraud*. Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diturunkan hipotesis.

H₁: Jabatan Aparatur Desa berpengaruh positif terhadap *Fraud* pada Dana Desa.

Pengaruh *Financial Pressure* terhadap *Fraud* Dana Desa

Financial pressure merupakan proyeksi dari faktor *Pressure* dalam teori *fraud pentagon*. Desakkan akibat kebutuhan keuangan yang ada dalam diri pribadi maupun dari luar yang mendorong seseorang melakukan upaya untuk mencukupi kebutuhan diluar kemampuannya. Gaji aparatur desa yang tidak terlalu tinggi akan menjadi pemicu terjadinya penyalahgunaan ataupun penyelewengan pada penggunaan keuangan desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Setiawati dan Baningrum (2018) menunjukkan bahwa tekanan kebutuhan keuangan tidak berpengaruh terhadap *fraud* pada laporan keuangan. Namun, pada penelitian yang dilakukan oleh Lambsdorff (1999), Zulaikha dan Hadiprajitno (2017), dan Suzana (2019) menemukan bahwa penghasilan yang kurang memadai berpengaruh positif terhadap korupsi. Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diturunkan hipotesis.

H₂: *Financial pressure* berpengaruh positif terhadap *Fraud* pada Dana Desa.

Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap *Fraud* Dana Desa

Ruankaew (2016) menyatakan bahwa kapasitas seseorang dapat memberikan efek yang negatif, yaitu memberikan kemampuan untuk menciptakan atau mengeksploitasi peluang penipuan secara tidak nampak dan merugikan banyak orang, hal ini sesuai dengan definisi kompetensi dalam teori *fraud pentagon*. Penipuan maupun kecurangan ini sangat rentan terjadi pada lingkungan desa akibat dari kapasitas aparatur desa maupun masyarakat yang berbeda atau tidak sama rata.

Penelitian yang dilakukan Saputra, dkk (2019), Irphani (2017), dan Aini, dkk (2017) juga menunjukkan kompetensi berpengaruh positif terhadap *fraud* dana desa. Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diturunkan hipotesis.

H₃: Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh positif terhadap *Fraud* pada Dana Desa.

Pengaruh *Ineffective Monitoring* terhadap *Fraud* Dana Desa

Ineffective Monitoring merupakan proyeksi dari faktor *Opportunity* dalam teori *fraud pentagon*. *Ineffective Monitoring* adalah situasi yang tercipta akibat tidak efektifnya pengawasan yang dilakukan untuk memastikan pengelolaan dana desa yang tepat sasaran. Tidak efektifnya pengawasan yang dilakukan pada pengelolaan keuangan desa memberikan peluang bagi aparatur desa dalam melakukan tindakan *fraud*.

Penelitian Aprilia (2017) dan penelitian Saputra dan Kusumaningrum (2017) menemukan bahwa efektifitas pengawasan tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Sementara itu, Penelitian Septriani dan Handayani (2018), Aini, dkk (2017) dan Putri, dkk (2017) menemukan bahwa *ineffective monitoring* berpengaruh positif terhadap *fraud*. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat diturunkan hipotesis.

H₄: *Ineffective Monitoring* berpengaruh positif terhadap *Fraud* pada Dana Desa.

Pengaruh Sistem *Weakness* terhadap *Fraud* Dana Desa

Sistem dan prosedur yang lemah akan memberikan peluang dalam melakukan sebuah tindakan kecurangan. Sistem *weakness* adalah sistem dan prosedur yang berkaitan dengan pembagian tugas dan wewenang setiap komponen perangkat desa, ketidakjelasan kegiatan prioritas dalam pengelolaan dana desa, dan ketidaktaatan pada aturan akuntansi terkait penerimaan dan pengeluaran kas memberikan peluang bagi aparatur desa dalam melakukan tindakan kecurangan.

Zulaikha dan Hadiprajitno (2017) menunjukkan bahwa *system weakness* berpengaruh positif terhadap *fraud*. Sementara itu, Budiartini, dkk (2019) menemukan bahwa penegakan peraturan yang baik berpengaruh negatif terhadap *fraud*. Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diturunkan

hipotesis.

H₅: Sistem *Weakness* berpengaruh positif terhadap *Fraud* pada Dana Desa.

Pengaruh Rasionalisasi terhadap *Fraud* Dana Desa

Rasionalisasi adalah pembenaran atas perbuatan yang salah, hal ini dinyatakan oleh Novianti dan Annisa, (2018). Pembenaran atas perbuatan yang salah sangat banyak beredar pada lingkungan masyarakat sehingga cenderung mendorong perbuatan curang yang terus terjadi hingga saat ini. Kemudian Kusuma, dkk (2019) menyatakan bahwa rasionalisasi adalah alasan yang bersifat pribadi sehingga semakin seseorang tinggi dalam berasionalisasi maka semakin mendorong seseorang tersebut dalam melakukan tindakan kecurangan.

Penelitian Zulaikha dan Hadiprajitno (2017) menunjukkan bahwa rasionalisasi yang diproyeksikan menjadi tiga variabel, yaitu sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku berpengaruh positif signifikan terhadap niat dalam melakukan *fraud*. Di samping itu, penelitian Aini, dkk (2017) dan Dwi, dkk (2017) menemukan bahwa rasionalisasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan *fraud*. Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diturunkan hipotesis.

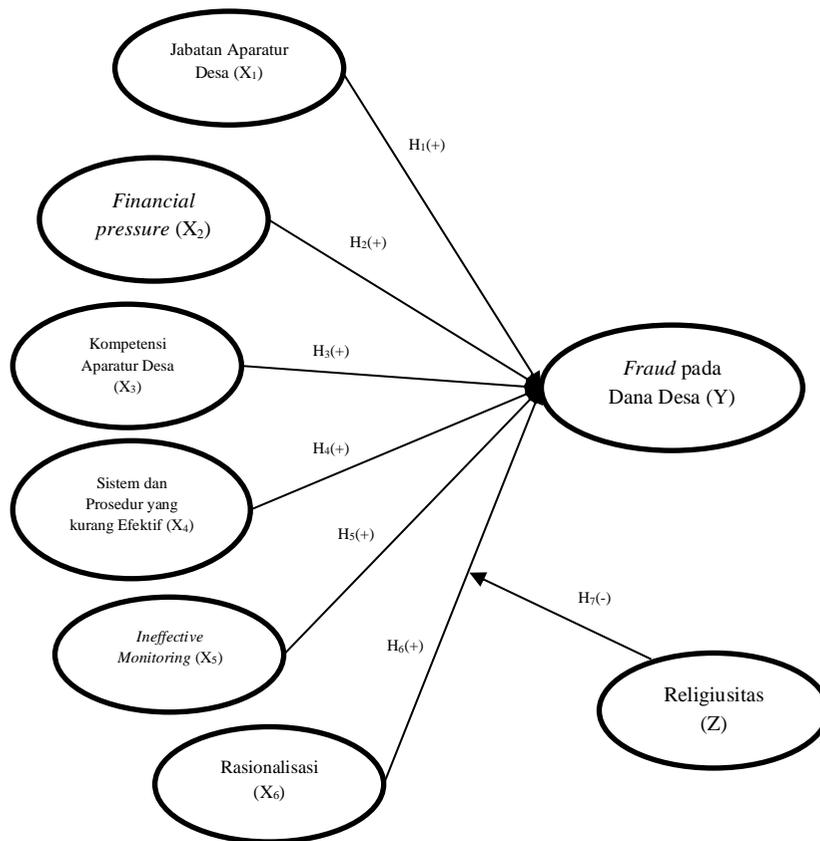
H₆: Rasionalisasi berpengaruh positif terhadap *Fraud* pada Dana Desa

Religiusitas, Rasionalisasi dan *Fraud* pada Dana Desa

Egita dan Mahfiroh (2018) menjelaskan bahwa religiusitas adalah bentuk keberagamaan yang meliputi berbagai macam sisi atau dimensi yang tidak hanya berkaitan dengan perilaku ritual atau beribadah tetapi juga melakukan berbagai aktivitas yang didorong oleh kekuatan supranatural. Pamungkas (2014), Egita dan Mahfiroh (2018), dan Basri (2016) menemukan bahwa religiusitas berpengaruh negatif terhadap *fraud*. Religiusitas sangat berkaitan dengan perilaku seperti yang dijelaskan dalam teori *planned behavior*, yaitu manusia berperilaku dengan mempertimbangkan informasi yang ada, akan tetapi dalam konteks religiusitas menjelaskan bahwa individu yang memiliki religiusitas tinggi akan mampu membedakan perilaku yang baik dan perilaku yang buruk sehingga religiusitas justru mampu menekan kecenderungan dalam berperilaku curang yang diakibatkan oleh

adanya rasionalisasi. Hariyanto, dkk (2014) menemukan bahwa religiusitas mampu memperlemah pengaruh rasionalisasi terhadap *fraud*. Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diturunkan hipotesis.

H₇: Religiusitas memperlemah pengaruh positif Rasionalisasi terhadap *Fraud* pada Dana Desa.



Gambar 1. Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Subyek Penelitian

Subyek penelitian terdiri dari populasi dan sampel penelitian yang relevan dengan tujuan penelitian. Populasi merupakan sekumpulan elemen atau unsur yang dijadikan sebagai obyek. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur desa di lingkup kantor pemerintahan desa di Daerah Provinsi Yogyakarta. Sementara sampel dari penelitian ini adalah aparatur desa di setiap kantor desa yang terpilih di setiap kabupaten yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *Judgement Sampling*. Rahi (2017) menjelaskan bahwa *Judgement Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada pertimbangan peneliti. Responden pada penelitian ini adalah aparatur pemerintah desa yang ada kantor pemerintahan desa di kabupaten Gunungkidul, Bantul, Kulon Progo, dan Sleman dengan pertimbangan untuk menghindari *personal assessment* yang lebih besar oleh kepala desa, sekretaris desa, dan kaur keuangan.

Jenis Data

Data yang digunakan, yaitu data primer. Bryman dan Bell (2011) menjelaskan bahwa data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Data primer dapat diperoleh dengan menggunakan metode kuesioner atau wawancara.

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dari hasil penyebaran kuesioner yang akan ditabulasi dan diuji menggunakan aplikasi *SmartPLS v.3*. Jawaban responden menggunakan skala likert yang berisi lima tingkat jawaban sebagai berikut:

1. Sangat Tidak Setuju (STS)
2. Tidak Setuju (TS)
3. Netral (N)
4. Setuju (S)
5. Sangat Setuju (SS)

Operasionalisasi Variabel

Terdapat tiga jenis variabel pada penelitian ini, yaitu variabel eksogen, endogen, dan moderasi. Variabel-variabel tersebut terdiri dari jabatan aparatur desa dan *financial pressure* yang diukur dengan menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Irphani (2017) dan terdiri dari empat item pernyataan, kompetensi aparatur desa dan *ineffective monitoring* dengan menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Mada, dkk (2017) dan terdiri dari empat dan lima item pernyataan, sistem *weakness*, rasionalisasi, dan *fraud* dana desa dengan menggunakan keusioner yang dikembangkan oleh Zulaikha

dan Hadiprajitno (2017) dan terdiri dari empat, sebelas, dan lima item pernyataan, dan religiusitas yang dikembangkan oleh Gunarto (2015) dan terdiri dari tujuh item pernyataan.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan alat analisis data dalam pengujian hubungan antar variabel dengan metode *Partial Least Square* (PLS). Analisis data meliputi evaluasi outer model, evaluasi inner model, dan pengujian hipotesis, hal ini dinyatakan oleh Ghozali dan Latan (2015).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik Deskriptif

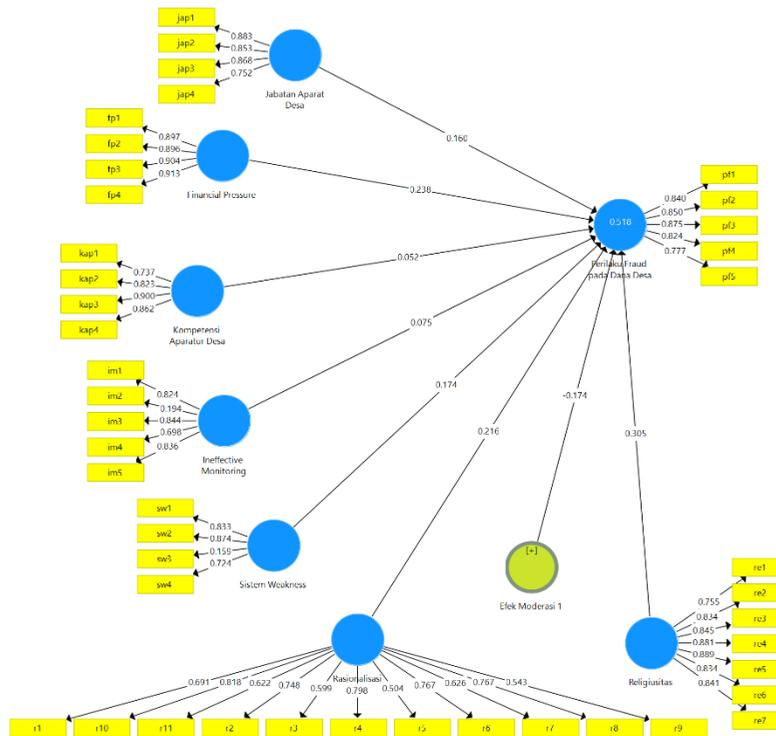
Tabel 1
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Kisaran Aktual			Kisaran Teoritis			Std. Deviation
		<i>Min</i>	<i>Max</i>	<i>Mean</i>	<i>Min</i>	<i>Max</i>	<i>Mean</i>	
JAP	174	5	20	14,03	4	20	12	3,282
FP	174	4	20	11,92	4	20	12	3,271
KAP	174	7	20	12,89	4	20	12	2,514
IM	174	3	15	11,43	3	15	9	2,127
SW	174	3	15	10,73	3	15	9	1,974
R	174	5	23	13,53	5	25	15	3,182
RE	174	20	35	29,87	14	35	24,5	4,009
PF	174	7	25	16,08	5	25	15	3,581
<i>Valid N (listwise)</i>	174							

Sumber: Output SPSS v.15

Berdasarkan tabel hasil uji statistik deskriptif di atas maka dapat disimpulkan bahwa data responden berjumlah 174 responden dengan nilai minimal, nilai maksimal, *mean*, dan standar deviasi masing masing. Kemudian seluruh variabel kecuali *financial pressure* dan rasionalisasi menunjukkan bahwa mean aktual > mean teoritis. Artinya, aparaturnya di provinsi DIY menilai pengaruh variabel-variabel tersebut adalah tinggi.

Convergent Validity dan Discriminant Validity



Gambar 2. Output Algoritma PLS

Uji validitas convergent dapat dilihat dan dinilai dari nilai *outer loading* untuk tiap indikator konstruk. Nilai *outer loading* merupakan korelasi antara skor item dengan skor konstruk yang dibangun. Pada penelitian ini, nilai *outer loading* yang ditetapkan yakni sebesar 0,70 sesuai dengan penelitian Chin pada tahun 1995 dan modul praktikum PLS yang ditulis oleh Hafiez Sofyan.

Tabel 2
Outer loading

	EM	FP	IM	JAP	KAP	PF	R	RE	SW
EM	1,001								
FP1		0,897							
FP2		0,896							
FP3		0,904							
FP4		0,913							
IM1			0,824						
IM2			0,194						
IM3			0,844						
IM4			0,698						

	EM	FP	IM	JAP	KAP	PF	R	RE	SW
IM5			0,836						
JAP1				0,883					
JAP2				0,853					
JAP3				0,868					
JAP4				0,752					
KAP1					0,737				
KAP2					0,823				
KAP3					0,900				
KAP4					0,862				
PF1						0,840			
PF2						0,850			
PF3						0,875			
PF4						0,824			
PF5						0,777			
R1							0,691		
R10							0,818		
R11							0,622		
R2							0,748		
R3							0,599		
R4							0,798		
R5							0,504		
R6							0,767		
R7							0,626		
R8							0,767		
R9							0,543		
RE1								0,755	
RE2								0,834	
RE3								0,845	
RE4								0,881	
RE5								0,889	
RE6								0,834	
RE7								0,841	
SW1									0,833
SW2									0,874
SW3									0,159
SW4									0,724

Sumber: Output *SmartPLS v.3*

Suatu konstruk dikatakan valid apabila konstruk menunjukkan nilai $> 0,70$. Berdasarkan output pada tabel 2 menunjukkan bahwa terdapat beberapa indikator yang $< 0,70$ diantaranya IM2, IM4, R1,

R3, R5, R7, R9, R11, dan SW3. Artinya, indikator-indikator tersebut dikatakan belum valid dan harus dihapuskan agar memenuhi *rule of thumb* yang ditetapkan, yaitu $> 0,70$.

Selain nilai *outer loading*, pengujian *convergent validity* dilanjutkan dengan melihat nilai AVE sebagai berikut:

Tabel 3
Average Variance Extracted (AVE)

	Rata-rata Varians Diekstrak (AVE)
<i>Efect Moderating</i>	1,000
<i>Financial pressure</i>	0,814
<i>Ineffective monitoring</i>	0,760
Jabatan Aparatur Desa	0,706
Kompetensi Aparatur Desa	0,694
<i>Fraud Pada Dana Desa</i>	0,696
Rasionalisasi	0,696
Religiusitas	0,707
<i>Sistem Weakness</i>	0,669

Sumber: Output *SmartPLS v.3*

Berdasarkan tabel 3 di atas menunjukkan nilai *Average Variance Extracted* $> 0,5$ untuk masing-masing variabel. Variabel yang memiliki nilai AVE terkecil adalah *Sistem Weakness* dan variabel yang memiliki nilai AVE terbesar adalah *Financial pressure*. Artinya, seluruh variabel pada penelitian ini dapat dikatakan valid.

Pengujian *diskriminant validity* merupakan keterbalikan dari *convergent validity*. *Diskriminant validity* menunjukkan ketidaksesuaian antara indikator atau variabel manifest yang seharusnya tidak mengukur secara tepat variabel lain apabila dibandingkan dengan variabelnya sendiri. Validitas diskrimina dilihat dari aspek Akar AVE dan *Cross Loading*.

Tabel 4
Fornell-Larcker

	EM	FP	IM	JAP	KAP	PF	R	RE	SW
EM	1,000								
FP	-0,003	0,902							
IM	-0,221	-0,037	0,872						
JAP	-0,193	0,124	0,392	0,840					

KAP	-0,069	0,359	0,171	0,253	0,833				
PF	-0,196	0,428	0,301	0,375	0,306	0,834			
R	0,242	0,276	0,031	-0,042	0,162	0,220	0,834		
RE	-0,099	0,043	0,336	0,259	0,053	0,447	-0,047	0,841	
SW	-0,112	0,368	0,137	0,195	0,213	0,495	0,198	0,352	0,818

Sumber: Output *SmartPLS v.3*

Berdasarkan data pada tabel 4 menunjukkan bahwa nilai akar AVE untuk semua variabel dalam penelitian ini menunjukkan nilai yang lebih besar apabila dibandingkan dengan nilai hubungan antara variabel sehingga dikatakan valid.

Tabel 5
Cross Loading

	EM	FP	IM	JAP	KAP	PF	R	RE	SW
EM	1,000	-0,003	-0,221	-0,193	-0,069	-0,196	0,242	-0,099	-0,112
FP1	0,041	0,897	-0,036	0,079	0,301	0,369	0,297	0,027	0,320
FP2	-0,067	0,896	-0,050	0,110	0,334	0,358	0,200	-0,002	0,310
FP3	0,022	0,904	-0,053	0,145	0,296	0,392	0,235	0,068	0,335
FP4	-0,011	0,913	0,000	0,112	0,362	0,421	0,262	0,056	0,359
IM1	-0,126	-0,112	0,872	0,306	0,141	0,247	0,053	0,319	0,112
IM3	-0,186	-0,061	0,864	0,374	0,221	0,230	0,004	0,285	0,145
IM5	-0,253	0,054	0,880	0,348	0,101	0,301	0,022	0,277	0,105
JAP1	-0,107	0,092	0,373	0,883	0,196	0,289	-0,034	0,201	0,159
JAP2	-0,111	0,080	0,356	0,853	0,224	0,304	0,010	0,142	0,085
JAP3	-0,245	0,126	0,306	0,868	0,229	0,361	-0,056	0,266	0,236
JAP4	-0,167	0,114	0,289	0,752	0,199	0,295	-0,060	0,253	0,161
KAP1	-0,064	0,262	0,144	0,128	0,737	0,157	0,202	-0,012	0,046
KAP2	-0,071	0,305	0,125	0,220	0,823	0,176	0,083	0,022	0,095
KAP3	-0,035	0,346	0,082	0,289	0,900	0,312	0,120	0,069	0,196
KAP4	-0,073	0,282	0,221	0,180	0,862	0,306	0,153	0,063	0,284
PF1	-0,121	0,413	0,285	0,245	0,303	0,840	0,271	0,353	0,437
PF2	-0,189	0,386	0,226	0,319	0,341	0,852	0,189	0,366	0,398
PF3	-0,202	0,403	0,331	0,287	0,259	0,876	0,192	0,369	0,447
PF4	-0,134	0,322	0,219	0,315	0,202	0,823	0,118	0,396	0,314
PF5	-0,170	0,249	0,183	0,408	0,161	0,776	0,135	0,384	0,462
R10	0,189	0,255	0,005	-0,025	0,137	0,250	0,872	-0,037	0,203
R2	0,161	0,208	0,065	0,031	0,146	0,141	0,819	-0,036	0,150
R4	0,206	0,201	-0,005	-0,090	0,117	0,133	0,845	-0,058	0,136
R6	0,200	0,135	-0,049	-0,084	0,156	0,106	0,802	-0,042	0,132
R8	0,247	0,289	0,082	-0,034	0,131	0,209	0,831	-0,032	0,170
RE1	-0,023	0,024	0,302	0,166	0,069	0,311	-0,081	0,755	0,296
RE2	-0,088	0,011	0,313	0,272	0,077	0,395	-0,037	0,834	0,221

	EM	FP	IM	JAP	KAP	PF	R	RE	SW
RE3	-0,025	0,021	0,297	0,184	0,075	0,366	-0,037	0,845	0,276
RE4	-0,091	0,029	0,261	0,255	0,047	0,400	-0,058	0,881	0,319
RE5	-0,112	0,036	0,233	0,187	0,048	0,361	-0,012	0,889	0,272
RE6	-0,166	0,112	0,313	0,246	-0,009	0,445	-0,057	0,834	0,378
RE7	-0,051	0,000	0,251	0,192	0,016	0,318	0,011	0,841	0,296
SW1	-0,107	0,277	0,122	0,163	0,106	0,381	0,121	0,319	0,833
SW2	-0,081	0,276	0,197	0,159	0,152	0,443	0,155	0,363	0,879
SW4	-0,089	0,353	0,005	0,156	0,268	0,388	0,211	0,172	0,736

Sumber: Output *SmartPLS v.3*

Berdasarkan tabel 5 di atas menunjukkan bahwa nilai indikator setiap konstuk untuk seluruh variabel menunjukkan nilai $> 0,7$. Artinya, setiap indikator pernyataan yang digunakan untuk setiap variabel dalam penelitian ini adalah valid.

Pengujian reliabilitas pada penelitian ini menggunakan *Cronbachs Alpha* dan *Composite Reliability* sebagai berikut:

Tabel 6
Cronbachs Alpha dan Composite Reliability

	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Composite Reliability</i>
<i>Efect Moderating</i>	1,000	1,000
<i>Financial pressure</i>	0,924	0,946
<i>Ineffective monitoring</i>	0,844	0,905
Jabatan Aparatur Desa	0,860	0,906
Kompetensi Aparatur Desa	0,857	0,900
<i>Fraud Pada Dana Desa</i>	0,890	0,919
Rasionalisasi	0,894	0,919
Religiusitas	0,931	0,944
<i>Sistem Weakness</i>	0,750	0,858

Sumber: Output *SmartPLS v.3*

Berdasarkan tabel 6 di atas menunjukkan bahwa nilai *Cronbachs Alpha* dan *Composite Reliability* untuk seluruh konstruk pada penelitian ini $> 0,6$. Dengan demikian, seluruh konstruk adalah reliabel.

Evaluasi Model struktural (*Inner Model*)

Tabel 7
Nilai Adjusted R-Square

	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>
<i>Fraud</i> Pada Dana Desa	0,501	0,477

Sumber: Output *SmartPLS v.3*

Semakin tinggi nilai *Adjusted R²* berarti semakin baik model prediksi dari model penelitian.

Tabel 7 menunjukkan bahwa *Fraud* pada Dana Desa dipengaruhi 47,7% oleh variabel independennya dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini.

Uji Hipotesis

Hasil pengujian hipotesis ditunjukkan dalam tabel *Path Coefficient* sebagai berikut:

Tabel 8
Path Coefficient

	<i>Original Sample (O)</i>	<i>t-statistik</i>	<i>p-values</i>
Efek Moderasi 1 -> <i>Fraud</i> Pada Dana Desa	-0,122	2,006	0,045
<i>Financial pressure</i> -> <i>Fraud</i> Pada Dana Desa	0,261	3,517	0,000
<i>Ineffective monitoring</i> -> <i>Fraud</i> Pada Dana Desa	0,079	1,108	0,268
Jabatan Aparatur Desa -> <i>Fraud</i> Pada Dana Desa	0,163	2,288	0,023
Kompetensi Aparatur Desa -> <i>Fraud</i> Pada Dana Desa	0,068	1,027	0,305
Rasionalisasi -> <i>Fraud</i> Pada Dana Desa	0,146	2,521	0,012
Religiusitas -> <i>Fraud</i> Pada Dana Desa	0,288	4,605	0,000
Sistem Weakness -> <i>Fraud</i> Pada Dana Desa	0,198	2,647	0,008

Sumber: Output *SmartPLS v.3*

Pengaruh Jabatan Aparatur Desa terhadap *Fraud* pada Dana Desa

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 8 menunjukkan bahwa nilai *original sample* adalah positif sebesar 0,163 sehingga arah pengujian sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Kemudian nilai *t-statistic* adalah $2,28 > 1,66$ dan nilai *p-values* adalah $0,02 < 0,05$. Dengan demikian, seluruh kriteria pengujian hipotesis telah terpenuhi atau **H₁ diterima**. Artinya, Jabatan Aparatur Desa berpengaruh positif signifikan terhadap *fraud* pada dana desa. Hasil yang signifikan ini menunjukkan bahwa Aparatur desa di lingkup kantor pemerintahan desa di Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan perspektif bahwa

salah satu penyebab terjadinya tindakan korupsi pada dana desa adalah jabatan yang tinggi. Hal ini sejalan dengan temuan Wolfe dan Hermanson (2004) yang menyatakan bahwa sebagian besar pelaku kecurangan adalah orang dalam yang memiliki kesempatan untuk melakukan kecurangan.

Pengaruh *Financial pressure* terhadap *Fraud* pada Dana Desa

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 8 menunjukkan bahwa nilai *original sample* adalah positif sebesar 0,261 sehingga arah pengujian sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Kemudian nilai *t-statistic* adalah $3,51 > 1,66$ dan nilai *p-values* adalah $0,00 < 0,05$. Dengan demikian, seluruh kriteria pengujian hipotesis telah terpenuhi atau **H₂ diterima**. Artinya, *Financial pressure* berpengaruh positif signifikan terhadap *fraud*. Meskipun tingkat gaji dan upah sudah ditetapkan dalam peraturan yang telah berlaku, tetapi Aparatur Desa tetap memberikan perspektif bahwa tekanan keuangan akan memicu terjadinya tindakan kecurangan. Hal ini didukung oleh pernyataan Hariyanto, dkk (2014) bahwa *pressure* mampu mendorong tindakan berbuat curang ketika memiliki peluang atas tindakan tersebut.

Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap *Fraud* pada Dana Desa

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 8 menunjukkan bahwa nilai *original sample* adalah positif sebesar 0,068 sehingga arah pengujian sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Kemudian nilai *t-statistic* adalah $1,02 < 1,66$ dan nilai *p-values* adalah $0,35 > 0,05$. Dengan demikian, kriteria signifikansi pada pengujian hipotesis tidak terpenuhi atau **H₃ ditolak**. Artinya, Kompetensi Aparatur Desa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *fraud* pada dana desa. Hasil yang tidak signifikan ini dikarenakan korupsi merupakan kasus yang sudah menjadi sorotan seluruh pihak termasuk pemerintah dan telah tersebar di masyarakat sehingga latar belakang pelaku kecurangan tidak berpengaruh karena siapa saja bisa melakukan tindakan kecurangan apabila menemukan sebuah peluang untuk mengeksploitasi penipuan.

Pengaruh *Ineffective Monitoring* terhadap *Fraud* pada Dana Desa

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 8 menunjukkan bahwa nilai *original sample* adalah positif sebesar 0,079 sehingga arah pengujian sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Kemudian nilai *t-statistic* adalah $1,10 < 1,66$ dan nilai *p-values* adalah $0,26 > 0,05$. Dengan demikian, kriteria signifikansi pada pengujian hipotesis tidak terpenuhi atau **H₄ ditolak**. Artinya, *Ineffective Monitoring* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *fraud* pada dana desa. Hasil yang tidak signifikan ini diindikasikan bahwa pengawasan dalam proses pengelolaan dana desa hanya sebagai sarana pemenuhan regulasi desa.

Pengaruh Sistem *Weakness* terhadap *Fraud* pada Dana Desa

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 8 menunjukkan bahwa nilai *original sample* adalah positif sebesar 0,198 sehingga arah pengujian sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Kemudian nilai *t-statistic* adalah $2,64 > 1,66$ dan nilai *p-values* adalah $0,00 < 0,05$. Dengan demikian, seluruh kriteria pengujian hipotesis telah terpenuhi atau **H₅ diterima**. Artinya, Sistem *Weakness* berpengaruh positif signifikan terhadap *fraud* pada dana desa. Aparatur Desa di Pemerintahan Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta berperspektif bahwa lemahnya sistem pengendalian internal dan terjadinya praktik yang tidak sehat dapat menjadi peluang dalam melakukan tindakan *fraud* sekalipun tata cara pengelolaan dana desa sudah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

Pengaruh Rasionalisasi terhadap *Fraud* pada Dana Desa

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 8 menunjukkan bahwa nilai *original sample* adalah positif sebesar 0,146 sehingga arah pengujian sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Kemudian nilai *t-statistic* adalah $2,52 > 1,66$ dan nilai *p-values* adalah $0,01 < 0,05$. Dengan demikian, seluruh kriteria pengujian hipotesis telah terpenuhi atau **H₆ diterima**. Artinya, Rasionalisasi berpengaruh positif signifikan terhadap *fraud* pada dana desa. Hasil yang signifikan ini menunjukkan bahwa rasionalisasi yang diukur dengan menggunakan indikator *planned behavior theory*, yaitu sikap (*attitude*), norma subjektif (*subjective norm*), dan kontrol perilaku (*perceived behavioral control*) mampu menggambarkan *fraud* yang dilakukan oleh pelaku kecurangan pada dana desa. Aparatur Desa yang ada

di Pemerintahan Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta cenderung setuju dengan adanya pembenaran yang dilakukan oleh pelaku kecurangan atas tindakan kecurangan yang dilakukan, seperti pelaku menganggap hal yang dilakukan merupakan sesuatu yang biasa dilakukan orang lain.

Religiusitas, Rasionalisasi, dan *Fraud* pada Dana Desa

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 8 menunjukkan bahwa nilai *original sample* adalah negatif sebesar 0,122 sehingga arah pengujian sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Kemudian nilai *t-statistic* adalah $2,006 > 1,66$ dan nilai *p-values* adalah $0,04 < 0,05$. Seluruh kriteria pengujian hipotesis telah terpenuhi dan **H₇ diterima**. Artinya, Religiusitas mampu memperlemah pengaruh positif rasionalisasi terhadap *fraud* pada dana desa. Dengan demikian, berdasarkan penelitian Sandri, dkk (2015) bahwa Religiusitas masuk kedalam kategori kuasi moderasi karena variabel Religiusitas menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap *fraud* pada dana desa. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitri dan Nadirsyah (2019) menjelaskan bahwa rasionalisasi tidak akan berpengaruh apabila setiap individu menjunjung tinggi nilai integritas, keimanan dan menyadari bahwa tindakan kecurangan adalah perbuatan yang ilegal.

KESIMPULAN

Berdasarkan data yang telah diuji, maka dapat disimpulkan bahwa jabatan aparatur desa, *financial pressure*, sistem *weakness*, rasionalisasi berpengaruh positif signifikan terhadap *fraud* dana desa dan religiusitas mampu menjadi kuasi moderasi. Sementara kompetensi aparatur desa dan *ineffective monitoring* tidak berpengaruh terhadap *fraud* dana desa. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan kesadaran bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam proses pengelolaan dana desa sehingga dana desa dapat dialokasikan secara tepat sasaran.

Penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan dengan menggunakan metode survey dengan teknik wawancara supaya lebih akurat dan menambah subjek penelitian dengan menentukan *simple size* sehingga mampu menggeneralisasikan populasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullahi, R., & Mansor, N. (2015). Fraud Triangle Theory and Fraud Diamond Theory. Understanding the Convergent and Divergent For Future Research. *Nternational Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*, 5(4). <https://doi.org/10.6007/IJARAFMS/v5-3/1823>
- Aini, N., Prayudi, M. A., & Diatmika, P. G. (2017). Pengaruh Perspektif Fraud Diamond Terhadap Kecenderungan Terjadinya Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Desa Di Kabupaten Lombok Timur). *Jurnal Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2). Retrieved from <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/14583>
- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior And Human Decision Processes*, 50, 179–211. <https://doi.org/10.15288/jsad.2011.72.322>
- Akbar, T. (2017). The Determination of Fraudulent Financial Reporting Causes by Using Pentagon Theory On Manufacturing Companies In Indonesia. *International Journal of Business, Economics and Law*, 14(12), 106–113.
- Aksa, A. F. (2018). Pencegahan dan Deteksi Kasus Korupsi pada Sektor Publik dengan Fraud Triangle. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi (JEBA)*, 20(4). Retrieved from <http://jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/jeba/article/view/1238>
- Aprilia. (2017). Analisis Pengaruh Fraud Pentagon Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Menggunakan Beneish Model Pada Perusahaan Yang Menerapkan Asean Corporate Governance Scorecard. *JURNAL ASET (AKUNTANSI RISET)*, 9(1), 49–60.
- Basri, Y. M. (2016). Pengaruh Dimensi Budaya Dan Religiusitas Terhadap Kecurangan Pajak. *Akuntabilitas Jurnal Ilmu Akuntansi*, 8(1), 61–77. <https://doi.org/10.15408/akt.v8i1.2764>
- Bawekes, H. F., Simanjuntak, A. M. A., & Daat, S. C. (2018). Pengujian Teori Fraud Pentagon Terhadap Fraudulent Financial Reporting. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, 13(1).
- BPK. (2018). “Akan Ada Tersangka Di Sleman.” Retrieved April 23, 2019, from Badan Pemeriksa Keuangan website: <http://yogyakarta.bpk.go.id/?p=10686>
- Budiantini, K., Dewi, G. A. R. S., & Herawati, N. T. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Fraud Diamond (Studi Empiris Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Buleleng). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 10(2), 113–123.
- CNN. (2019). “ICW: Sektor Anggaran Desa Jadi yang Paling Korup di 2018.”
- DJPk. (2019). “Rincian Alokasi Dana Desa TA 2019.”
- Dwi, C., Lestari, A., Sujana, E., & Julianto, I. P. (2017). Pengaruh Opportunity, Pressure, Rationalization, Dan Perilaku Tidak Etis Terhadap Kecenderungan Terjadinya Kecurangan (Studi Empiris Pada Hotel ABC Denpasar). *Jurnal Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2).
- Egita, E., & Mahfiroh, S. (2018). Pengaruh Kesesuaian Kompensasi, Reward and Punishment dan Religiusitas Terhadap Fraud (Studi Pada Karyawan BMT di Kabupaten Wonosobo). *Jurnal*

Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi (JEBA), 20(4).

- Fitri, F., & Nadirsyah. (2019). Pengaruh Tekanan (Pressure), Kesempatan (Opportunity), Rasionalisasi (Rationalization), Dan Kapabilitas (Capability) Terhadap Kecurangan Pengadaan Barang/Jasa Di Pemerintahan Aceh Dengan Pemoderasi Budaya Etis Organisasi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 4(3), 412–427.
- Gbegi, D. ., & Adebisi, J. . (2013). The New Fraud Diamond Model- How Can It Help Forensic Accountants in Fraud Investigation in Nigeria? *European Journal of Accounting Auditing and Finance Research*, 1(4), 129–138. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial Least Squares - Konsep, Teknik, Dan Aplikasi menggunakan SmartPLS 3.0*. Semarang: Badan Penerbit - Universitas Diponegoro.
- Gunarto. (2015). *Pengaruh Religiusitas Dan Status Sosial Ekonomi Keluarga Terhadap Persepsi Bunuh Diri Pada Siswa Mts Di Kabupaten Gunungkidul*. Universitas Muhammaiayah Yogyakarta.
- Hariyanto, W., Rini, D. D. O., & Margianawati, D. (2014). Pengaruh Dimensi Fraud Diamond Terhadap Perilaku Kecurangan Akademik Mahasiswa Akuntansi Yang Dimoderasi Religiusitas. *Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA)*.
- Irphani, A. (2017). *Pengaruh Tekanan, Keefektifan Sistem Pengendalian Internal, Perilaku Tidak Etis, dan Jabatan dalam Pengelola Keuangan Terhadap Fraud*.
- Ishannuddin. (2018). “ICW: Ada 181 Kasus Korupsi Dana Desa, Rugikan Negara Rp 40,6 Miliar.” Retrieved April 23, 2019, from Kompas.com website: <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/21/19000481/icw-ada-181-kasus-korupsi-dana-desa-rugikan-negara-rp-406-miliar>
- Kemenkeu. (2018). Akumulasi Penyaluran Dana Desa Hingga Tahun 2018 Tahap 2 Mencapai Rp149,31 Triliun. Retrieved October 18, 2019, from Kemenkeu.go.id website: <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/akumulasi-penyaluran-dana-desa-hingga-tahun-2018-tahap-2-mencapai-rp149-31-triliun/>
- Kusuma, I. C., Nurfitri, R., & Mukmin, M. N. (2019). Pengaruh Pressure, Opportunity, Rasionalization Dan Capability Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Fraud). *Jurnal Akunida*, 5(1), 54–68.
- Kusumo, H. J. (2018). “Bendahara Desa Beji Diduga Gelapkan Dana Desa, Ini Kronologinya.” Retrieved April 22, 2019, from HarianJogja.com website: <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2018/09/16/513/939997/bendahara-desa-beji-diduga-gelapkan-dana-desa-ini-kronologinya>
- Lambsdorff, J. G. (1999). *Corruption in Empirical Research: A Review*. 10–15.
- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. *Riset Akuntansi Dan Auditing “Goodwill,”* 3(1), 11–15.

- Nurgiyantoro, B., Gunawan, & Marzuki. (2015). *Statistik Terapan Untuk Penelitian Ilmu Sosial* (6th ed.). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Pamungkas, I. D. (2014). Pengaruh Religiusitas dan Rasionalisasi dalam Mencegah dan Mendeteksi Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 15(2), 48–59.
- Puspitha, M. Y., & Yasa, G. W. (2018). Fraud Pentagon Analysis In Detecting Fraudulent Financial Reporting (Study On Indonesian Capital Market). *International Journal of Sciences: Basic and Applied Research*, 42(5), 93–109. Retrieved from <http://gssrr.org/index.php?journal=JournalOfBasicAndApplied>
- Putri, I. G. A. E. P., Sulindawati, N. L. G. E., & Atmadja, A. T. (2017). Pengaruh Financial Targets dan Ineffective Monitoring Terhadap Terjadinya Fraud (Studi Kasus pada Koperasi Serba Usaha Dana Pertiwi Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali). *E-Journal Akuntansi Ganesha*, 7(1).
- Rahi, S. (2017). Research Design and Methods: A Systematic Review of Research Paradigms, Sampling Issues and Instruments Development. *International Journal of Economics & Management Sciences*, 6(2). <https://doi.org/10.4172/2162-6359.1000403>
- Resky Pratiwi, N., & Nurbaiti, A. (2018). Analisis Fraud Pentagon Dalam Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan Dengan Metode F-Score Model (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode 2012-2016). *E-Proceeding of Management*, 5(3).
- Ruankaew, T. (2016). Beyond the fraud diamond. *International Journal of Business Management and Economic Research*, 7(1), 474–476. Retrieved from www.ijbmer.com
- Sandri, N. K., Putri, I. G. A. M. A. D., & Dwirandra, A. A. N. B. (2015). Kemampuan Alokasi Belanja Modal Memoderasi Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah pada Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 4(05), 331–360.
- Saputra, K. A. K., Pradnyanitasari, P. D., Prihandani, N. M. I., & Putra, I. G. B. N. P. (2019). Praktek Akuntabilitas Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Untuk Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 10(2), 168–176. <https://doi.org/10.22225/KR.10.2.915.168-176>
- Saputra, M. A. R., & Kusumaningrum, N. D. (2017). Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Fraudulent Financial Reporting Dengan Perspektif Fraud Pentagon Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan (JAK)*, 22(2).
- Septriani, Y., & Handayani, D. (2018). Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan dengan Analisis Fraud Pentagon. *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Bisnis*, 11(1), 11–23. Retrieved from <http://jurnal.pcr.ac.id>
- Setiawati, E., & Baningrum, R. M. (2018). Deteksi Fraudulent Financial Reporting Menggunakan Analisis Fraud Pentagon : Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Listed Di Bei Tahun 2014-2016. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 3(2), 91. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v3i2.6645>

- Suzana, S. (2019). Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Penyebab Fraud Di Sektor Pemerintahan Kota Banjarbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 05(01).
- Widasari, M., & Juliarsa, G. (2016). Pengaruh Kompetensi, Independensi, Dan Profesionalisme Auditor Internal Dalam Mencegah Kecurangan Pada Bpr Di Kabupaten Badung. *E-Jurnal Akuntansi*, 17(3), 1924–1952.
- Zaki, N. M. (2017). The appropriateness of fraud triangle and diamond models in assessing the likelihood of fraudulent financial statements - An empirical study in firms listed in the egyptian stock exchange. *International Journal of Social Science and Economic Research*, 2(2). Retrieved from www.ijsser.org
- Zulaikha, Z., & Hadiprajitno, P. T. B. (2017). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Procurement Fraud: Sebuah Kajian Dari Perspektif Persepsian Auditor Eksternal. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 13(2), 194–220. <https://doi.org/10.21002/jaki.2016.11>
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014.
- Permendagri No. 113 Tahun 2014.
- PP No. 6 Tahun 2014.